

Pengoptimalan Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Perusahaan Tambang di Indonesia

Reza Hening Wijaya¹, Utpala Rani^{2*}, Nibras Anny Khabibah³

¹Universitas Tidar, Indonesia

*Corresponding author: utpala@untidar.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.24036/wra.v8i2.110070>

Diterima : 18 Oktober 2020
Direvisi : 20 November 2020
Disetujui : 29 November 2020
Tersedia daring : 04 Desember 2020

Abstract

This descriptive research aims to depict the extent to which mining companies in Indonesia are trying to be accountable for the implementation of social and environmental responsibility. The identification results of 15 coal mining companies' annual reports of show that most companies rely on qualitative explanations to provide confidence to stakeholders about their behavior towards the environment and society. The lack of companies that disclose quantitative aspects and the relevance of social and environmental responsibility activities can indicate a lack of seriousness by the company in realizing its promise to preserve nature and improve the lives of the surrounding communities

Keywords: Green Accounting; CSR; Accountability; Coal Mining Corporations

Abstraksi

Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan sejauh mana perusahaan pertambangan di Indonesia berusaha untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hasil identifikasi dari 15 laporan tahunan perusahaan tambang batubara menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan mengandalkan penjelasan kualitatif untuk memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan tentang perilaku mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Minimnya perusahaan yang mengungkapkan aspek kuantitatif dan relevansi kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat menunjukkan kurangnya keseriusan perusahaan dalam mewujudkan janjinya untuk melestarikan alam dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

Kata-kata kunci: Akuntansi Hijau; Akuntabilitas; CSR; Perusahaan Tambang Batubara

Cara Membuat Kutipan (APA 6th style):

Wijaya, Reza Hening; Rani, Utpala; Khabibah, Nibras Anny. (2020). Pengoptimalan Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Perusahaan Tambang di Indonesia. *Wahana Riset Akuntansi*. Vol 8 (No 2), 118-125



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Some rights reserved

PENDAHULUAN

Konsep *green accounting* atau akuntansi hijau dimulai pertama kali oleh negara-negara Eropa pada tahun 1970-an akibat maraknya perusakan lingkungan sebagai dampak industri. Peningkatan aktivitas manusia yang mulai mengancam kelestarian ekologi memunculkan keprihatinan berbagai pihak. Hal ini mendorong berkembangnya gerakan *sustainability development* sehingga berdampak pada ekspektasi pemangku kepentingan terhadap perilaku perusahaan (Cormier dkk 2004, Deegan dan Gordon 1996).

Perkembangan isu lingkungan telah mendorong sejumlah pembelajar akuntansi (*accounting scholar*) memunculkan konsep akuntansi hijau (*green accounting*). Secara sederhana, akuntansi hijau merupakan salah satu bagian ilmu akuntansi yang berusaha memasukkan faktor biaya lingkungan

dalam hasil keuangan dari operasi. Sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomik (Suwardjono 2005), akuntansi hijau juga harus mampu menggambarkan sejauhmana aspek lingkungan diinternalisasi oleh perusahaan. Houldin dalam Gray dan Bebington (2001) menyebutkan tiga alasan utama mengapa akuntan perlu terlibat dalam isu pengelolaan lingkungan, yakni (1) isu lingkungan sesungguhnya merupakan isu bisnis; (2) pengelolaan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan bisnis; (3) isu-isu lingkungan disadari berimplikasi pada aspek keuangan perusahaan dari berbagai sisi. Konsep akuntansi hijau (AH) kerap disebut juga dengan *sustainability accounting* dan *environmental accounting*.

Implementasi akuntansi hijau pada aktivitas operasi perusahaan sangat erat dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau *corporate social responsibility* (TJSL). Kasus lumpur panas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo konon menjadi pemicu pemerintah menjadikan TJSL sebagai kewajiban untuk perusahaan perseroan. Dasar perusahaan wajib menjalankan TJSL ialah adanya teori akuntabilitas korporasi (*corporate accountanbility theory*) menurut teori ini perusahaan harus bertanggung jawab dengan konsekuensi yang ditimbulkan atas kegiatan operasinya baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kewajiban perusahaan perseroan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam Pasal 74 Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada 20 Juli 2007. TJSL atau TJSL menjadi suatu perhatian khusus untuk perseroan yang bergerak di bidang eksploitasi alam. Eksploitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengusahaan; pendayagunaan (perkebunan, tambang, dan sebagainya) mengeruk.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara mencantumkan definisi pertambangan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Indonesia memiliki berbagai potensi sumber daya alam dan batu bara adalah salah satu komoditas utama yang dieksploitasi pada sektor pertambangan. Sayangnya, eksploitasi batu bara di berbagai daerah sangat minim pengawasan untuk tahap pemulihan lahan bekas galian. Fakta ini mencuat beberapa tahun lalu saat beredar tayangan melalui *platform* Youtube yang berjudul *Sexy Killer*. Film dokumenter ini yang menceritakan sisi kelam perusahaan- perusahaan energi di Indonesia, terutama pertambangan batu bara.

Kemunculan film *Sexy Killer* memunculkan pertanyaan tentang keseriusan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan. Pengeksploitasian batu bara di Indonesia meninggalkan lubang tambang yang tidak hanya merusak struktur tanah tetapi juga menimbulkan ancaman keselamatan bagi warga sekitar. Lubang bekas galian tidak hanya menjadi kolam-kolam raksasa yang disalahgunakan sebagai arena bermain anak-anak, tetapi juga masih mengandung senyawa kimia yang digunakan dalam proses penambangan. Ketidakpedulian perusahaan tambang pada pemulihan *site* diduga salah satunya didorong oleh prinsip orientasi keuntungan (*profit*). Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, hal ini mengindikasikan adanya *research gap* pada penelitian ini secara konseptual yakni belum adanya bentuk pertanggungjawaban lingkungan secara optimal. Belum adanya peraturan bagi perusahaan terkait pengukuran, penilaian, pengungkapan, dan penyajian dalam biaya lingkungan menjadi masalah menarik untuk diteliti.

Penelitian ini akan membahas lebih banyak tentang pelaksanaan *green accounting* dan TJSL yang dilaksanakan oleh perusahaan tambang di Indonesia. Secara spesifik, tujuan ini adalah (1) mengidentifikasi peran konsep akuntansi hijau pada akuntabilitas TJSL perusahaan pertambangan batu bara yang telah *go public*; dan (2) mengidentifikasi peran regulasi untuk pengoptimalan peran akuntansi hijau untuk meningkatkan akuntabilitas laporan TJSL perusahaan pertambangan batu bara yang telah *go public*. Penelitian ini disajikan dalam empat bagian besar, yakni latar belakang, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, serta penutup.

Akuntansi Hijau (*Green Accounting*)

Green accounting adalah pemikiran yang berupaya mengelompokkan biaya yang dilakukan organisasi dalam melakukan pemeliharaan lingkungan ke dalam pos lingkungan dan praktek organisasi bisnis (Suartana 2010). Tujuan akuntansi hijau adalah menyediakan dan menyajikan informasi biaya lingkungan yang relevan untuk para *stakeholders*. Akuntansi tentang biaya lingkungan

telah diatur dalam PSAK 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan, PSAK 33 mengenai Akuntansi Pertambangan Umum, PSAK 57 mengenai Provisi, Kontijens Liabilitas dan Kotijensi Aset di mana adanya transaksi atau kejadian yang erat kaitannya dengan lingkungan hidup, PSAK 25 mengenai Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Koreksi Kesalahan, PSAK 64 Eksplorasi Mineral, dan PSAK 5 Segmen Operasi. Namun, tampaknya sampai saat ini dampak eksternalitas belum sepenuhnya bisa diinternalisasi oleh perusahaan tambang batu bara. Kendala utama internalisasi tersebut adalah pengukuran nilai *cost* dan *benefit* yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan karena bukan perkara mudah untuk mengukur dampak perusakan lingkungan bahkan terkadang tidak bisa terukur oleh akuntansi. *Green accounting* sebagai paradigma baru menuju era praktik akuntansi yang lebih sensitif, responsif, dan akuntabel terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang mereformasikan rekonstruksi dan transformasi kerangka konseptual, prinsip-prinsip dasar dari standar akuntansi keuangan konvensional (Lako, 2011).

Lako (2018) menyebutkan setidaknya ada empat faktor pemicu dan pemacu terjadinya krisis ekologi nasional. Pertama, fokus pembangunan nasional yang lebih menitik beratkan pada aspek-aspek kepentingan ekonomi dan bisnis dengan orientasi utama pada pertumbuhan ekonomi dan laba yang sebesar-besarnya. Asumsinya adalah apabila korporasi meraup laba dan perekonomian terus bertumbuh tinggi maka kemajuan dan kemakmuran bangsa akan terwujud. Kedua, kegagalan sistem dan tata kelola pembangunan ekonomi, bisnis dan korporasi yang etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Selama ini, sistem dan tatakelola pembangunan ekonomi dan bisnis nasional lebih memberikan keleluasaan kepada para pelaku ekonomi dan bisnis untuk mengeksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan serta sumberdaya sosial-ekonomi masyarakat seluas-luasnya. Ketiga, kegagalan dalam sistem dan tatakelola keuangan korporasi yang tidak ramah lingkungan. Selama ini, sistem keuangan korporasi juga dikritik tidak ramah lingkungan karena cenderung mengabaikan faktor-faktor sumberdaya alam dan lingkungan serta sumberdaya sosial dalam proses valuasi dan penentuan nilai uang terhadap obyek-obyek, peristiwa-peristiwa dan transaksi-transaksi sosial dan lingkungan serta dampak-dampak eksternalitas dari operasi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dalam proses keuangan. Keempat, kegagalan sistem dan praktik akuntansi dalam mengakui, mengukur nilai, mencatat, meringkas dan melaporkan informasi akuntansi berkaitan dengan obyek, peristiwa, kejadian atau transaksi-transaksi sosial dan lingkungan. Selama ini akuntansi konvensional yang berbasis pada akuntansi keuangan (*financial accounting*) cenderung mengabaikan faktor-faktor sosial dan lingkungan tersebut dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan kepada para pemakai.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*)

Menurut Lako (2011), jika ditilik dari prinsip etika ekologi, pebisnis harus menyadari bahwa korporasi hidup dalam alam (*corporate in the nature*), bukan alam untuk korporasi (*nature for the corporate*). Prinsip *corporate in the nature* menekankan bahwa perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem, serta tidak merusaknya karena akan menjadi bumerang bagi kelangsungan bagi operasi perusahaan. Alam juga tidak boleh dieksploitasi secara serampangan karena akan merugikan kepentingan dan membahayakan kehidupan bersama.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan masih menjadi polemik di kalangan pebisnis, pemerintah, dan masyarakat di Indonesia. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh dua hal. Pertama, pelaku bisnis hanya memandang TJSL adalah beban bukan investasi. Kedua, TJSL dirumuskan pasal 74 Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas bersifat konservatif dan berpotensi meningkatkan beban perusahaan yang memicu *conflict of interest*. Padahal, jika ditinjau lebih lanjut, TJSL merupakan suatu kewajiban asasi korporasi, yakni perusahaan semestinya bertanggung jawab atas segala tindakannya dan perusahaan potensial mendapatkan manfaatnya, antara lain berupa kesetiaan pelanggan, inovasi yang berkelanjutan, maupun peningkatan kinerja keuangan.

Pelaporan TJSL disajikan dalam laporan tahunan perusahaan. Menurut Benschop dan Meihuzein (2002) berpendapat bahwa laporan tahunan menjalankan dua fungsi komunikasi, yakni sebagai instrumen penyedia informasi dan media representasi identitas. Oleh karena itu, laporan tahunan juga menjadi sarana yang tepat untuk mengidentifikasi komitmen lingkungan secara substantif. Pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan yang cenderung naratif daripada kuantitatif lebih berpotensi menyamarkan rendahnya komitmen pada aspek lingkungan maupun ketidaktaan pada regulasi lingkungan (Cho dkk 2010).

Akuntabilitas

Saat ini, akuntabilitas berasosiasi dengan proses untuk bertanggungjawab atas tindakan seseorang. Menurut Mulgan (2000), akuntabilitas memiliki sejumlah fitur. Pertama, akuntabilitas bersifat eksternal, yakni melibatkan pemberian kewenangan yang diberikan kepada seseorang dan harus dipertanggungjawabkan. Kedua, akuntabilitas melibatkan interaksi dan pertukaran sosial (*social interaction and exchange*), yakni adanya tahap mencari dan mendapatkan kewenangan sehingga memunculkan *right of authority* dan rektifikasi atau pembenaran. Konsepsi akuntabilitas secara logis menjelaskan adanya hubungan dua pihak antara agen (pihak internal perusahaan seperti manajer) sebagai pihak yang memberikan pertanggungjawabkan dan prinsipal (pihak eksternal perusahaan seperti investor) sebagai pihak yang diberikan pertanggungjawabkan. Prinsipal melepas kontrol atas sumber dayanya kepada agen, memberikan instruksi atau ekspektasi tentang penggunaan sumber daya kemudian agen bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas (tindakan) dan pemberian pertanggungjawabkan atas tindakan tersebut (Gray *et al.*, 1996).

Akuntabilitas informasi TJSL suatu perusahaan publik secara sederhana bisa diidentifikasi dari sejauhmana perusahaan mengungkapkan informasi yang relevan terkait aktivitasnya. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30/ SEOJK.04/ 2016, informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan terkait aspek TJSL mencakup kebijakan, jenis program, dan biaya. Sejahterama suatu perusahaan memenuhi regulasi tersebut mengindikasikan level akuntabilitas informasi yang diungkapkan. Sebagian besar perusahaan juga memanfaatkan foto sebagai media untuk mewakili informasi yang berkaitan dengan aktivitas TJSL. Akan tetapi, perlu kiranya diperhatikan, apakah perusahaan mencantumkan informasi lain yang relevan agar pembaca bisa menjustifikasi kebenaran dan menilai akuntabilitas informasi TJSL.

Perusahaan Tambang Batu Bara di Indonesia

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang berperan sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan nasional. Pada tahun 2011 Indonesia menghasilkan 105 miliar ton batu bara dan sekitar 75% diekspor ke Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Eropa, sisanya untuk kebutuhan dalam negeri (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2011). Sayangnya tambang batu bara di Indonesia umumnya dikelola dengan sistem *open pit mining* yang memicu kerusakan lingkungan (Paitung dkk 2011). Hal ini tentu saja berdampak pada kerusakan lingkungan yang parah, misalnya hilangnya vegetasi hutan, flora dan fauna, serta lapisan tanah. Selain itu, gangguan akibat pencemaran air (fungsi hidrologis), keragaman jenis (*biodiversity*), serapan karbon (*carbon sequestration*), pemasok oksigen, dan pengatur suhu lingkungan juga terjadi secara perlahan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP. Selain itu, perusahaan tambang batu bara memiliki kewajiban untuk melaksanakan reklamasi areal bekas tambang dan daerah sekitarnya yang terganggu akibat aktivitas pertambangan (Paitung, 2011). Menurut Suharsono Manoarfa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan terdapat setidaknya 109 lubang tambang di Kalimantan Timur, baik skala kecil maupun besar yang membutuhkan biaya besar untuk reklamasi ulang (Bappenas, 2019). Namun, menurut pihak Jatam (Jaringan Advokasi Tambang), sampai dengan tahun 2019 di Kalimantan Timur terdapat 1.735 lubang bekas tambang dari berbagai perusahaan yang dibiarkan menganga begitu saja dan sudah menewaskan 36 korban jiwa yang didominasi oleh anak-anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk memahami akuntabilitas informasi TJSL perusahaan tambang batu bara. Menurut Fraenkel dan Wallen (2008) analisis isi merupakan teknik yang digunakan untuk mengkaji fenomena melalui tinjauan analisis komunikasi melalui buku, *essay*, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Identifikasi data-data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: (1) Merumuskan tujuan secara khusus berkenaan dengan hal-hal yang ingin dicapai. (2) Mengidentifikasi istilah-istilah penting yang harus dijelaskan secara mendalam seperti TJSL dan *green accounting*. (3) Mengkhususkan unit analisis, yakni perusahaan tambang di Indonesia. (4) Mencari data serta sumber yang relevan. (5) Membangun hubungan rasionalitas dan konseptual untuk menghasilkan hasil yang berkaitan dengan tujuan

penelitian. (6) Menentukan sampel penelitian. (7) Merumuskan kategori. Hal-hal tersebut dapat terlihat dari informasi akuntansi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan. Penelitian ini mengidentifikasi strategi pengungkapan TJSL, yakni apakah informasi TJSL lebih banyak dilakukan secara kuantitatif (mencantumkan angka-angka yang terkait implementasi akuntansi hijau) atau kualitatif (uraian kata-kata yang berupa penjelasan tentang aktivitas yang terkait), serta apakah perusahaan tambang tersebut menggunakan foto yang relevan sebagai bagian dari pengungkapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi Hijau dan Akuntabilitas Informasi TJSL Perusahaan Tambang

Merujuk Pada Gray dan Milne (2004) dalam Bebbington dan Larrinaga (2014) suatu pembangunan keberlanjutan akan sulit bilamana dihubungkan dengan konteks organisasi atau perusahaan. Kaitannya ialah dengan kewajiban perusahaan untuk mempublikasikan pelaporan eksternal yang tidak diikuti adanya peraturan penerapan pembangunan keberlanjutan yang relevan dan transparan untuk diungkapkan. Kondisi ini tentu saja mendorong perusahaan menjadi lebih agresif dan eksploitatif terhadap lingkungan karena minimnya kepedulian tentang biaya lingkungan (Diaz, 2014) dan Ashari. *et al* (2020). Selama ini, pemangku kepentingan lebih banyak menyoroiti sisi kinerja keuangan (*profit*) dan mengabaikan sisi lingkungan (*planet*) serta manusia atau masyarakat (*people*). Maka akuntansi hijau pada dasarnya akan berusaha menyeimbangkan perhatian perusahaan maupun pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

Green accounting atau akuntansi hijau pada hakikatnya merupakan suatu integrasi antara akuntansi keuangan, akuntansi sosial, dan akuntansi lingkungan secara padu untuk menghasilkan informasi akuntansi yang andal, reliabel, relevan, dan bermanfaat pada pengambilan keputusan perusahaan (Lako, 2011) dan Bebbington dan Larrinaga (2014). Akuntansi hijau memiliki hubungan kausalitas yang mencakup semua fenomena kegiatan perusahaan dengan lingkungan yang akan diukur, dicatat, dan dilaporkan secara terpadu, utuh, dan relevan (Lako, 2018). Dengan demikian akuntansi hijau merupakan lingkup akuntansi yang akan memberikan manfaat antara lingkungan dan sosial bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Akuntansi TJSL secara konseptual dijelaskan sebagai proses pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan informasi terkait dampak sosial dan lingkungan dari tindakan-tindakan ekonomi perusahaan terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan yang menjadi pemangku kepentingan dalam perusahaan. Pengungkapan TJSL pada laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia masih dianggap hal yang simbolis dan tidak banyak mendapatkan perhatian. Secara umum, ada dua dimensi yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi akuntansi hijau dalam TJSL. Pertama, perusahaan mengungkapkan biaya dan manfaat (*cost and benefit*) yang terkait aktivitas TJSL yang berdampak pada laba. Kedua, perusahaan melaporkan biaya dan manfaat (*cost and benefit*) aktivitas ekonomi yang berdampak langsung terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan. Pengungkapan manfaat yang muncul dari pengorbanan (*cost*) umumnya dilakukan secara kualitatif karena manfaat cenderung lebih sulit diukur.

Penelitian ini berpendapat bahwa perusahaan semestinya bisa memanfaatkan akuntansi hijau untuk meningkatkan akuntabilitas informasi TJSL yang diungkapkan. Keberadaan informasi kuantitatif tentang aktivitas TJSL dalam laporan tahunan bisa membantu pemangku kepentingan menilai sejauh mana keseriusan pelaksanaan TJSL. Informasi kuantitatif terkait akuntansi hijau bisa berupa biaya rehabilitasi lingkungan yang telah dikeluarkan perusahaan untuk mereklamasi lahan bekas galian, kadar racun yang mengontaminasi lahan bekas lahan, luas lahan yang telah direklamasi, pendanaan aktivitas pengembangan masyarakat di wilayah galian tambang dan sebagainya.

Sektor tambang batubara masuk dalam kelompok industri pertambangan sub sektor batubara (kode 21). Perusahaan pada sektor pertambangan batubara (*coal mining*) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia-BEI (*Indonesia Stock Exchange-IDX*) sampai dengan tahun 2019 berjumlah 25 perusahaan (tampak pada tabel 1). Namun, dari jumlah itu, dua perusahaan, yakni Bara Jaya Internasional, Tbk. (ATPK) dan Borneo Lumbang Energi dan Metal, Tbk. (BORN) tidak lagi bisa diakses dari situs BEI sehingga hanya 23 perusahaan yang bisa dianalisis dalam penelitian ini. Hasil identifikasi terhadap laporan tahunan tahun 2019 ke-23 perusahaan yang bisa diakses dari situs BEI menunjukkan hanya 16 perusahaan yang mengungkapkan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi kuantitatif yang

diidentifikasi dari seksi atau bagian TJSL dalam laporan tahunan antara lain biaya lingkungan, biaya TJSL, serta data kinerja sosial dan lingkungan. Hasil identifikasi tersebut ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 1. Perusahaan Pertambangan Batubara yang Terdaftar di BEI

No.	Kode	Nama Perusahaan
1.	ADRO	Adaro Energy Tbk.
2.	ARII	Atlas Resources Tbk.
3.	ATPK	Bara Jaya Internasional Tbk.*)
4.	BORN	Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.*)
5.	BOSS	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
6.	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
7.	BUMI	Bumi Resources Tbk.
8.	BYAN	Bayan Resources Tbk.
9.	DEWA	Darma Henwa Tbk.
10.	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk.
11.	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk.
12.	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk.
13.	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.
14.	GTBO	Garda Tujuh Buana Tbk.
15.	HRUM	Harum Energy Tbk.
16.	INDY	Indika Energy Tbk.
17.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
18.	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.
19.	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
20.	MYOH	Samindo Resources Tbk.
21.	PTBA	Bukit Asam Tbk.
22.	PTRO	Petrosea Tbk.
23.	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk.
24.	SMRU	SMR Utama Tbk.
25.	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk.

Sumber: Fact Book BEI tahun 2018

Tabel 2 tersebut menunjukkan perusahaan cenderung memilih menggunakan tipe informasi kualitatif untuk pengungkapan TJSL. Apabila dikaitkan dengan implementasi akuntansi hijau, tipe informasi kuantitatif bisa digunakan perusahaan untuk membentuk atau meningkatkan akuntabilitas informasi yang disajikan dalam laporan tahunan. Hal ini dimungkinkan karena informasi kuantitatif tersebut lebih mungkin diverifikasi oleh pemangku kepentingan. Selain itu, perusahaan lebih sulit memunculkan informasi yang bersifat kuantitatif tanpa didasari data yang riil. Data riil tersebut hanya bisa dimiliki jika perusahaan mengimplementasikan akuntansi hijau dan menjalankan program TJSL yang terencana dan terarah.

Tabel 2. Hasil Identifikasi Laporan Tahunan Perusahaan Tambang Batubara

No.	Kode	Nama Perusahaan	Tipe Informasi		Gambar		Relevan	
			Kualitatif	Kuantitatif	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	ADRO	Adaro Energy Tbk.	v	v	v		v	
2	ARII	Atlas Resources Tbk.	v	-	v			v
3	BOSS	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.	v	-	v		v	
4	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	v	v		v		
5	BUMI	Bumi Resources Tbk.	v	v		v		
6	BYAN	Bayan Resources Tbk.	v	-	v			v
7	DEWA	Darma Henwa Tbk.	v	v	v		v	
8	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk.	v	v	v			v
9	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk.	v	v	v		v	
10	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk.	v	v	v			v

11	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	v	v		v		
12	GTBO	Garda Tujuh Buana Tbk.	v	-		v		
13	HRUM	Harum Energy Tbk.	v	v	v		v	
14	INDY	Indika Energy Tbk.	v	-	v			v
15	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	v	v	v		v	
16	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.	v	v	v			v
17	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.	v	v	v		v	
18	MYOH	Samindo Resources Tbk.	v	-		v		
19	PTBA	Bukit Asam Tbk.	v	v	v		v	
20	PTRO	Petrosea Tbk.	v	v		v		
21	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk.	v	v	v		v	
22	SMRU	SMR Utama Tbk.	v	-		v		
23	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk.	v	v		v		

Regulasi, Akuntansi Hijau, dan Akuntabilitas Informasi TJSL

Secara umum, regulasi lingkungan dan pengungkapan yang ada di Indonesia sebenarnya cukup baik. Keputusan OJK untuk memasukkan aspek biaya sebagai salah satu elemen pengungkapan menunjukkan bahwa otoritas menganggap akuntansi hijau yang mendasari penyajian informasi lingkungan sebagai informasi yang cukup penting bagi pemangku kepentingan. Sayangnya, belum semua perusahaan menyajikan informasi tersebut. Padahal, penyajian informasi kuantitatif tidak hanya menyeimbangkan jenis informasi yang diterima, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas informasi yang diungkapkan perusahaan. Implementasi akuntansi hijau juga memungkinkan perusahaan menyajikan informasi yang terukur dan komparabel dari tahun ke tahun.

Serupa dengan penyajian informasi kuantitatif, penggunaan gambar atau foto dalam laporan tahunan semestinya mampu memberikan gambaran kepada pembaca tentang aktivitas yang dilakukan perusahaan. Selain itu, foto atau gambar semestinya berfungsi sebagai media yang meningkatkan akuntabilitas informasi naratif perusahaan. Berdasarkan tabel 2, sebagian besar perusahaan tambang batubara menggunakan gambar yang relevan atau terkait aktivitas TJSL untuk disajikan sebagai penguat. Penggunaan foto atau gambar yang tidak berkaitan dengan aktivitas yang dilaporkan justru menjadi distorsi bagi penyerapan informasi oleh pembaca.

Pengaplikasian akuntansi hijau memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bebbington dan Larrinaga (2014) bahwa praktik akuntansi dapat merefleksikan hal-hal keberlanjutan bagi perusahaan sehingga perlu adanya eksplorasi untuk membenahi masalah lingkungan yang diakibatkan operasi perusahaan. Senada dengan penelitian Ashari *et al* (2020) dengan adanya implementasi akuntansi hijau, diharapkan permasalahan hubungan lingkungan dan sosial akibat operasi perusahaan dapat tertasi dengan efektif. Maka diharapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dapat mengambil peran untuk menetapkan standar akuntansi hijau di Indonesia.

SIMPULAN

Simpulan utama dari penelitian ini adalah kecenderungan perusahaan pertambangan batu bara mengandalkan informasi kualitatif dalam pengungkapan seksi atau bagian TJSL. Hanya sebagian perusahaan yang bersedia menyajikan informasi kuantitatif sebagai bagian dari pengungkapan TJSL. Padahal, regulasi pengungkapan yang dikeluarkan OJK mensyaratkan tipe informasi kuantitatif, minimal berupa biaya dan data kinerja atau capaian yang dicapai pada tahun tersebut. Penerapan akuntansi hijau semestinya bisa membantu perusahaan mengkalkulasi dan menyajikan informasi keuangan yang terkait aktivitas TJSL secara akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Ashari, M. H., Muawanah, U., & Lisa, O. (2020). Keterkaitan Ukuran Perusahaan Organisasi dan Pemahaman Manajemen Terhadap Penerapan Akuntansi Hijau (Green Accounting). *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 33-54.

- Bebbington, J., & Larrinaga, C. (2014). Accounting and sustainable development: An exploration. *Accounting, Organizations and Society*, 395-413.
- Benschop, Y., and H. E. Meihuizen. 2002. Keeping up gendered appearances: representations of gender in financial annual reports. *Accounting, Organizations and Society* 27 (7):611-636.
- Cho, Charles H., Robin W. Roberts, and Dennis M. Patten. 2010. The language of us corporate environmental disclosure. *Accounting, Organizations and Society* 35, no. 4: 431-443.
- Cormier, Denis, Irene M. Gordon, and Michel Magnan. 2004. Corporate environmental disclosure: Contrasting management's perceptions with reality. *Journal of Business Ethics* 49: 143-165.
- Deegan, Craig and Ben Gordon. 1996. A study of the environmental disclosure practices of australian corporations. *Accounting and Business Research* 26, no. 3: 187-199.
- ESDM, K. (2011, Maret 12). *Harga Batubara Acuan (HBA) Maret 2011 Turun Menjadi US\$ 122.43/Ton*. Retrieved Agustus 30, 2020, from Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/harga-batubara-acuan-hba-maret-2011-turun-menjadi-us-12243-ton>
- Fraenkel, J. R., & Wallen, E. N. (2008). *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting & Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gray, R.H. dan Jan Bebbington. 2001. *Accounting for the Environment*. London: Sage Publishing.
- Gumay, A. N. (2020, Februari 4). *Pembangunan Ibu Kota Baru Terkendala 109 Lubang Bekas Tambang*. Retrieved Oktober 1, 2020, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200204141549-85-471528/pembangunan-ibu-kota-baru-terkendala-109-lubang-bekas-tambang>
- Lako, Andreas. 2018. *Akuntansi Hijau: Isu, Teori & Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lako, Andreas. 2010. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Lako, A. (2011). *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Mulgan, R. (2000). *'Accountability': An Ever-expanding Concept?* Canberra: Public Administration.
- Patiung, Onesimus, Naik Sinukaban, Suria Darma Tarigan, dan Dudung Darusman. 2011. Pengaruh Umur Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara Terhadap Fungsi Hidrologis. *Jurnal Hidrolitan*. Volume 2 No. 2.
- Suartana, I Wayan. 2010. Akuntansi lingkungan dan triple bottom line accounting: Paradigma baru akuntansi bernilai tambah. *Jurnal Bumi Lestari*. Volume 1 No.1: 105-112.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.